



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH (RLPPD)
KABUPATEN DAIRI**

TAHUN ANGGARAN 2022



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN DAIRI T.A. 2022

I. PENDAHULUAN

Penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Dairi T.A. 2022 kepada masyarakat dilaksanakan dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana dalam Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat.

RLPPD pada hakikatnya merupakan informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, selanjutnya sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, muatan RLPPD adalah sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja makro;
- b. Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar;
- c. Hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya;
- d. Ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan
- e. Inovasi daerah.

Hal-hal yang terangkum di dalam RLPPD ini, tentunya akan menjadi informasi bagi masyarakat untuk melihat berbagai keberhasilan maupun kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan kebijakan daerah yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk kesepakatan bersama dalam perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Dairi setiap tahunnya.

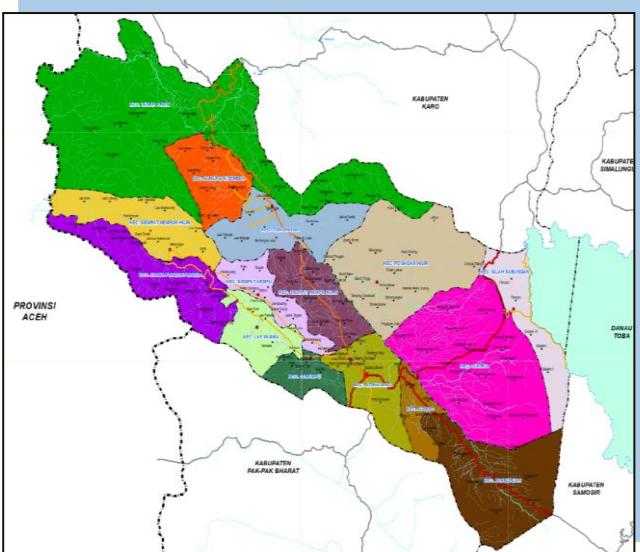
Kabupaten Dairi terletak di bagian barat daya Kota Medan, dengan luas 1.927,80 Km (192.780 Hektar) yang secara administrasi terdiri dari 15 Kecamatan, 161 Desa dan 8 Kelurahan. Secara Astronomi terbentang antara $98^{\circ} 00' - 98^{\circ} 38'$ Bujur Timur (BT) dan $2^{\circ} 15' - 3^{\circ} 10'$ Lintang Utara (LU), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan Kabupaten Aceh Tenggara (Provinsi NAD) dan Kabupaten Karo (Provinsi Sumatera Utara);
- Sebelah timur dengan Kabupaten Samosir (Provinsi Sumatera Utara);
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Pakpak Bharat (Provinsi Sumatera Utara);
- Sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Selatan (Provinsi NAD).

Kabupaten Dairi dibagi menjadi beberapa wilayah administratif yang terdiri dari:

- a. 15 Kecamatan yang masing-masing dikepalai oleh seorang Camat;
- b. 8 Kelurahan yang masing-masing dikepalai oleh seorang Lurah;
- c. 161 Desa yang masing-masing dikepalai oleh seorang Kepala Desa;
- d. 799 Dusun yang masing-masing dikepalai oleh seorang Kepala Dusun;

e. 67 Lingkungan yang masing-masing dikepalai oleh Kepala Lingkungan.



Luas Wilayah = 192.780 Ha

- **15 Kecamatan**
- **161 Desa**
- **8 Kelurahan**
- **799 Dusun**
- **67 Lingkungan**
- **Jumlah penduduk Desember 2022: 321.546 Jiwa**

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022 pada hakikatnya merupakan komitmen dan upaya bersama seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Dairi dalam mewujudkan visi "**MEWUJUDKAN DAIRI UNGGUL YANG MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT DALAM HARMONI KEBERAGAMAN**" sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 .

Perumusan dan pendalaman terhadap makna yang terkandung dalam visi dimaksud menghasilkan pilar-pilar visi dengan pemahaman sebagai berikut :

DAIRI UNGGUL, adalah suatu kondisi yang mencerminkan suatu semangat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Dairi, yang :

- 1) UNGGUL dalam kualitas dan kuantitas pengelolaan produksi daerah berbasis industri khususnya terhadap komoditas unggulan daerah yang nyata dan dapat memberikan nilai tambah (*value added*) secara signifikan sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 2) UNGGUL dalam standar kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang menjadi pelayanan dasar kebutuhan masyarakat, meliputi: kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.
- 3) UNGGUL dalam standar dan kualitas pelayanan, administrasi dan manajemen sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT, mengandung arti bahwa keseluruhan aktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sejalan dengan tujuan pemberian otonomi daerah yang luas kepada Daerah, yakni diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi secara adil dan merata.

HARMONI KEBERAGAMAN, didasari pemikiran bahwa keanekaragaman kondisi daerah dan masyarakat Kabupaten Dairi dengan berbagai aspek geografi, demografi, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup serta keterkaitan multi sektor, multi dimensi dalam pembangunan diperlukan adanya keselarasan dalam penataan dan pengelolaannya.

Misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Dairi, dirumuskan dan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan sistem pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.
- 2) Membangun kualitas sumber daya masyarakat Dairi yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing.

- 3) Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah.
- 4) Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *clean government* (pemerintahan yang bersih) dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 5) Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Dairi selama 5 tahun sesuai dengan RPJMD adalah digambarkan sebagai berikut :

ARAH KEBIJAKAN				
2020	2021	2022	2023	2024
Reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengembangan layanan umum yang unggul	Pengembangan sumber daya manusia yang unggul serta berdaya saing.	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan.	Penguatan sektor unggulan ekonomi daerah, keterampilan berusaha, dan perluasan kesempatan bekerja	Akselerasi capaian pembangunan yang ditopang sistem pemerintahan berbasis elektronik

II. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Untuk mengukur capaian kinerja makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat 6 (enam) indikator, yaitu :

1. Indeks Pembangunan Manusia;
2. Angka Kemiskinan;
3. Angka Pengangguran;
4. Pertumbuhan Ekonomi;
5. Pendapatan Per kapita dan ;
6. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini).

Berikut ini kami sampaikan capaian kinerja makro Kabupaten Dairi yang terdiri dari 6 (enam) indikator, yaitu sebagai berikut :

No	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Perubahan	Penjelasan
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,84	72,56	0,72	Dalam satu dekade terakhir, pembangunan manusia di Kabupaten Dairi terus mengalami peningkatan. IPM Kabupaten Dairi meningkat dari 66,95 pada 2012 menjadi 72,56 pada 2022. Selama periode tersebut, rata-rata IPM Kabupaten Dairi tumbuh sebesar 0,78 persen per tahun dan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” sejak 2017.
2	Umur Harapan Hidup (Tahun)	69,19	69,64	0,45	Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2012 hingga 2022, UHH telah meningkat sebesar 2,38 tahun atau tumbuh dengan rata-rata sebesar 0,34 persen per tahun.

No	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Perubahan	Penjelasan
3	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,11	13,24	0,13	Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2012 hingga 2022, HLS Kabupaten Dairi telah meningkat rata-rata 1,42 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,33 persen per tahun.
4	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,59	9,72	0,13	
5	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Per Tahun (Ribu Rupiah)	10.504	10.740	236	Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran riil per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada 2022, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Dairi mencapai Rp10,74 juta per tahun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,25 persen.

No	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Perubahan	Penjelasan
6	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	23.720	22.530	-1.190	
7	Persentase Penduduk Miskin (%)	8,31	7,88	-0,43	Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada Maret 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dairi sebanyak 22.530 orang dengan besar persentase kemiskinannya adalah sebesar 7,88. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi mengalami penurunan. Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin sebanyak 23.720 orang dengan besar persentase nya yaitu 8,31 persen. Pada Maret 2022 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 119 orang dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,43 persen.

No	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Perubahan	Penjelasan
8	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,24	0,65	-0,59	Pada periode 2012-2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung mengalami penurunan. Pada Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,24 menjadi 0,65 pada Maret 2022.
9	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,28	0,20	-0,08	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,28 menjadi 0,08 pada periode yang sama. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menipis, sedangkan peningkatan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengindikasikan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Dairi semakin rendah.

No	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Perubahan	Penjelasan
10	Garis Kemiskinan (Rupiah)	408.893	436.713	27.820	<p>Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2022 garis kemiskinan Kabupaten Dairi sebesar Rp. 436.713,- per kapita per bulan.</p>
11	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,49	0,88	-0,61	<p>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 0,88 persen. Artinya, dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar satu orang pengangguran.</p>

No	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Perubahan	Penjelasan
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	85,73	85,01	-0,72	TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada bulan Agustus 2022 sebesar 85,01 persen, turun sekitar 0,72 persen poin dibandingkan 2021. Apabila dibandingkan dengan 2020, TPAK naik sebesar 14,79 persen poin.
13	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,05	4,21	2,16	Pertumbuhan ekonomi membandingkan PDRB riil periode berjalan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi tahun 2022 menjadi 4,21, meningkat 2,16% dibandingkan dengan Tahun 2021, hal ini sebagai dampak meredanya COVID-19 dan juga pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menyebakan respon positif pasar pada semua sektor di Kabupaten Dairi.
14	Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)	31,16	33,98	2,82	Pendapatan perkapita adalah rata-rata dari pendapatan yang diperoleh seorang penduduk dari aktivitas

					perekonomian yang bisa menggambarkan kondisi kesejahteraan penduduk. Secara rata-rata, pada tahun 2022 seorang penduduk di Kabupaten Dairi mampu menghasilkan pendapatan sebesar 33,98 juta rupiah atau meningkat drastis sebesar Rp.2.820.000 dari tahun 2021, yaitu 31,16 Juta Rupiah.
15	Gini ratio	0,2268	0,221	-0,0058	Gini Ratio Kabupaten Dairi mengalami penurunan dari 0,2268 Tahun 2021 menjadi 0,221 Tahun 2022. Hal ini menunjukkan semakin kecil tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Dairi.

Sumber : BPS Kabupaten Dairi Tahun 2022

III. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan mencakup urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, selanjutnya urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam dokumen Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini, yang kami sampaikan adalah fokus hanya urusan wajib pelayanan dasar.

Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Indikator pelaksanaan pelayanan dasar selanjutnya dimuat dalam Standar Pelayanan Minimal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun pelayanan dasar dimaksud terdiri dari 6 (enam) urusan :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
6. Sosial.

Gambaran capaian kinerja urusan pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

A. URUSAN PENDIDIKAN

1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM 2	Indikator Pencapaian / Output 3			Total Pencapaian 4
1	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			100.00%
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	• Jumlah yang Harus Dilayani:	3,783	3,783	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Percentase capaian mutu 100%
	1.Buku gambar	3,783	3,783	0	100.00%
	2.Alat mewarnai	3,783	3,783	0	100.00%
	3.Penyediaan biaya personil Peserta Didik	3,783	3,783	0	100.00%
	4.Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	111	111	0	100.00%
	5.Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	70	70	0	100.00%
	JUMLAH	11,530	11,530	0	500.00%
2.	Pendidikan Dasar				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani:	51,702	51,702	0	100%

	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
	1. Buku teks pelajaran	51,702	51,702	0	100.00%
	2. Perlengkapan belajar	51,702	51,702	0	100.00%
	3. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	383	383	0	100.00%
	4. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	243	243	0	100.00%
	5. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	2,579	2,579	0	100.00%
	6. Penyediaan biaya personil peserta didik	6,118	6,118	0	100.00%
	7. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	3,172	3,172	0	100.00%
	8. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	62	62	0	100.00%
	JUMLAH	115,961	115,961	0	800.00%
3.	Pendidikan Kesetaraan				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani:	197	197	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
	1. Modul belajar	287	287	0	100.00%
	2. Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	9	9	0	100.00%

	3. Penyediaan biaya personil peserta didik	197	197	0	100.00%
	4. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	19	19	0	100.00%
	5. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	3	3	0	100.00%
	6. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	3	3	0	100.00%
	7. Perlengkapan belajar	197	197	0	100.00%
	8. PKBM Terakreditasi minimal C	3	3	0	100.00%
	JUMLAH	718	718	0	800.00%

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
					1	2		
	KAB. DAIRI				94,218,945,190	94,218,945,190	100.00%	
1	PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI				6,557,667,830	6,557,667,830	100.00%	
	1	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD K20220131030517			436,159,000	436,159,000	100.00%	
		1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik	36,159,000	36,159,000	100.00%	
		2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan	200,000,000	200,000,000	100.00%	

		3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta didik	0	0	0%
		4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta didik	200,000,000	200,000,000	100.00%
		5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	0%
		6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				436,159,000	436,159,000	100.00%
2	Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan K20220131030758				4,122,835,000	4,122,835,000	100.00%
		1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0%
		2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0%
		3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	3,185,555,000	3,185,555,000	100.00%

		4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	<u>468,640,000</u>	<u>468,640,000</u>	100.00%
		5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan	<u>468,640,000</u>	<u>468,640,000</u>	100.00%
	JUMLAH INDIKATOR					4,122,835,000	4,122,835,000
3			Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) K20220131030938		1,332,449,220	1,332,449,220	100.00%
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	<u>666,224,610</u>	<u>666,224,610</u>	100.00%
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	<u>0</u>	<u>0</u>	0%
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	<u>0</u>	<u>0</u>	0%
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	<u>0</u>	<u>0</u>	0%
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	<u>0</u>	<u>0</u>	0%

		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	666,224,610	666,224,610	100.00%
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini		0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				1,332,449,220	1,332,449,220	100.00%
4			Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) K20220131031456		666,224,610	666,224,610	100.00%
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	666,224,610	666,224,610	100.00%
		2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				666,224,610	666,224,610	100.00%
	JUMLAH PROGRAM				6,557,667,830	6,557,667,830	100.00%

2	PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR				87,574,050,010	87,574,050,010	100.00%
5	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) K20220131031634			35,514	35,514	35,514	100.00%
	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	287	287	287	100.00%
	2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	35,227	35,227	35,227	100.00%
	3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	0	0%
	4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR			35,514	35,514	35,514	100.00%
6	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) K20220131031749			0	0	0	0.00%
	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	0	0	0	0%
	2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	0	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR			0	0	0	0.00%
7	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) K20220131032010			86,094,042,690	86,094,042,690	86,094,042,690	100.00%

		1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	<u>80,227,350</u>	<u>80,227,350</u>	100.00%
		2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	<u>11,493,182,670</u>	<u>11,493,182,670</u>	100.00%
		3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	<u>11,493,182,670</u>	<u>11,493,182,670</u>	100.00%
		4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	<u>63,027,450,000</u>	<u>63,027,450,000</u>	100.00%
	JUMLAH INDIKATOR				86,094,042,690	86,094,042,690	100.00%
8	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B) K20220131032146				0	0	0.00%
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	<u>0</u>	<u>0</u>	0%
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Guru	<u>0</u>	<u>0</u>	0%

		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0%
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0%
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Kegiatan	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR					0	0	0.00%
9			Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B) K20220131032556		1,480,000,000	1,480,000,000	100.00%
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	0%
		2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak	Kegiatan	1,480,000,000	1,480,000,000	100.00%

			untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak				
	JUMLAH INDIKATOR				1,480,000,000	1,480,000,000	100.00%
	JUMLAH PROGRAM				87,574,050,010	87,574,050,010	100.00%
3	PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN				80,227,350	80,227,350	100.00%
10	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan) K20220321023938				0	0	0.00%
	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	0	0	0	0%
	2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	0	0	0	0%
	3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	0	0%
	4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
11	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan) K20220321024011				0	0	0.00%
	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	0	0	0	0%

		2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
12	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan) K20220321024025				80,227,350	80,227,350	100.00%
	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan		Kegiatan	80,227,350	80,227,350	100.00%
	2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun		Kegiatan	0	0	0%
	3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat		Kegiatan	0	0	0%
	4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran		Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				80,227,350	80,227,350	100.00%
13	Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan) K20220321024044				0	0	0.00%
	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga		Pendidik dan	0	0	0%

			kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	tenaga kependidikan			
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0%
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0%
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
14	Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan) K20220321024123				0	0	0.00%

	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	0%
	2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
	3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
JUMLAH PROGRAM				80,227,350	80,227,350	100.00%
	1	Bantuan Fisik Kemdikbudristek (DAK) tahun 2022		15,182,006,000	13,122,195,829	86,43%
	2	Dana Hibah BOS,BOP (DAK Non Fisik) Kemdikbudristek tahun 2022		63,356,005,887	63,267,150,387	99,86%
	3	Bantuan Provinsi (BKP)		1,350,000,000	1,200,000,000	88,88%
	4	Kegiatan Gasing SD (CSR PT.Bank Sumut)		175,000,000	175,000,000	100.00%
	5	Bantuan Sarpras PAUD dari CSR PT.Inpola Meka Energi		40,000,000	40,000,000	100.00%
	6	kegiatan BPMP monitoring IKM 2022		5,000,000	5,000,000	100.00%

B. URUSAN KESEHATAN

1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PRATAMA			76.05%
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				73.78%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	59.23%
	• Jumlah yang Harus Dilayani:	6,345	4,698	1,647	74%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				14.54%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	72.72%
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	634	500	134	78.86%
	2. Tablet tambah darah	571,050	280,560	290,490	49.13%
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	20,023	4,698	15,325	23.46%
	4. Kartu ibu/rekam medis ibu	6,345	4,698	1,647	74.04%
	5. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	6,345	4,698	1,647	74.04%
	6. Dokter/dokter spesialis kebidanan	26	26	0	100.00%
	7. Bidan	310	310	0	100.00%
	8. Perawat	225	185	40	82.22%
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				70.91%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	55.98%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	6,056	4,238	1,818	70%

	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				14.93%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
	1 . Formulir Partografi	6,056	3,538	2,518	58.42%
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	6,345	2,564	3,781	40.41%
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	6,345	4,238	2,107	66.79%
	4 . Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	26	26	0	100.00%
	5 . Bidan	310	310	0	100.00%
	6 . Perawat	225	185	40	82.22%
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				73.24%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	58.45%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	5,768	4,214	1,554	73%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				14.79%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
	1 . Vaksin Hepatitis B0	5,768	4,214	1,554	73.06%
	2 . Vitamin K1 injeksi	5,768	4,214	1,554	73.06%
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	5,768	4,214	1,554	73.06%
	4 . Formulir bayi baru lahir	5,768	4,214	1,554	73.06%
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	17,304	4,214	13,090	24.35%
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	6,345	4,238	2,107	66.79%
	7 . Dokter/dokter spesialis Anak	26	26	0	100.00%
	8 . Bidan	310	310	0	100.00%
	9 . Perawat	225	185	40	82.22%
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita				76.07%

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	61.67%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	27,907	21,514	6,393	77%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				14.39%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	71.97%
	1. Kusioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	0	0	0	0%
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	27,907	0	27,907	0%
	3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	6,345	4,238	2,107	66.79%
	4. Vitamin A Biru	17,289	13,600	3,689	78.66%
	5. Vitamin A Merah	22,598	22,598	0	100.00%
	6. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	22,598	17,747	4,851	78.53%
	7. Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	5,309	4,900	409	92.30%
	8. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	27,907	21,514	6,393	77.09%
	9. Peralatan Anafilaktik	18	18	0	100.00%
	10. Bidan	310	310	0	100.00%
	11. Dokter	23	23	0	100.00%
	12. Perawat	225	185	40	82.22%
	13. Ahli Gizi	23	23	0	100.00%
	14. Guru PAUD	5,543	222	5,321	4.01%
	15. Kader Kesehatan	506	506	0	100.00%

5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				82.92%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	71.54%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	54,560	48,789	5,771	89%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				11.38%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	56.92%
	1. Buku raport kesehatanku	51,832	18	51,814	0.04%
	2. Buku pemantauan kesehatan	2,728	18	2,710	0.67%
	3. Kuesioner skrining kesehatan	54,560	18	54,542	0.03%
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	51,832	18	51,814	0.04%
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	51,832	18	51,814	0.04%
	6. Dokter/Dokter gigi	41	41	0	100.00%
	7. Bidan	310	310	0	100.00%
	8. Perawat	225	185	40	82.22%
	9. Ahli Gizi	23	23	0	100.00%
	10. Tenaga Kesehatan Masyarakat	31	31	0	100.00%
	11. Guru	5,858	5,858	0	100.00%
	12. Kader Kesehatan	2,530	2,530	0	100.00%
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				73.55%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	59.47%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	164,264	122,113	42,151	74%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				14.08%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	70.39%

	1. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	36	18	18	50.00%
	2. Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	493,938	6,322	487,616	1.28%
	3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	18	18	0	100.00%
	4. Dokter	23	23	0	100.00%
	5. Bidan	310	310	0	100.00%
	6. Perawat	225	185	40	82.22%
	7. Ahli Gizi	23	23	0	100.00%
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	31	31	0	100.00%
	9. Tenaga Non Kesehatan Terlatih	0	0	0	0%
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				94.86%
	PERSENTASE PENCAPIAAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.72%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	33,482	33,364	118	100%
	PERSENTASE PENCAPIAAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				15.14%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	75.72%
	1 .Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	33,482	33,364	118	99.65%
	2.Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	33,482	33,364	118	99.65%
	3 . Buku kesehatan lansia	33,482	0	33,482	0%

	4 . Dokter	23	23	0	100.00%
	5 . Bidan	310	310	0	100.00%
	6 . Perawat	225	185	40	82.22%
	7 . Ahli Gizi	23	23	0	100.00%
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	31	31	0	100.00%
	9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	0	0	0	0%
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				50.07%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	34.16%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	73,562	31,413	42,149	43%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				15.91%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	79.53%
	1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	36	18	18	50.00%
	2. Tensimeter	576	141	435	24.48%
	3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	18	18	0	100.00%
	4. Dokter	23	23	0	100.00%
	5. Bidan	310	310	0	100.00%
	6. Perawat	225	185	40	82.22%
	7. Tenaga Kesehatan Masyarakat	31	31	0	100.00%
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				87.62%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	71.41%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	2,570	2,294	276	89%

	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.21%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
	1. Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	57,090	9,176	47,914	81.04%
	2. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	18	18	0	100.00%
	3. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	36	18	18	50.00%
	4. Dokter	23	23	0	100.00%
	5. Bidan	310	310	0	100.00%
	6. Perawat	225	185	40	82.22%
	7. Ahli Gizi	23	23	0	100.00%
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	31	31	0	100.00%
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				80.04%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	62.04%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	401	311	90	78%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	90.00%
	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	18	18	0	100.00%
	2. Kit berisi 2 Alat Fiksasi	18	18	0	100.00%
	3. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	18	18	0	100.00%

	4. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	36	18	18	50.00%
	5. Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	36	36	0	100.00%
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				68.55%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	55.22%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	5,979	4,127	1,852	69%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				13.33%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	66.67%
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	36	18	18	50.00%
	2 . Reagen Zn TB	5,979	0	5,979	0%
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	5,979	4,127	1,852	69.02%
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	17,955	8,632	9,323	48.08%
	5 . Catridge tes cepat molekuler	5,979	1,040	4,939	17.39%
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	18	18	0	100.00%
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	2	2	0	100.00%
	8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	27	27	0	100.00%
	9 . Perawat	225	185	40	82.22%
	10 . Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	18	18	0	100.00%
	11 . Penata Rontgen	5	5	0	100.00%
	12 . Tenaga kesehatan masyarakat	31	31	0	100.00%
	13 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	0	0	0	0%

12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)				80.99%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	66.36%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	7,950	6,595	1,355	83%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				14.62%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	73.11%
	1. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	36	0	36	0%
	2. Tes cepat HIV (RDT) pertama	7,950	6,595	1,355	82.96%
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	7,950	6,595	1,355	82.96%
	4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	7,950	6,595	1,355	82.96%
	5. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	27	27	0	100.00%
	6. Perawat	225	185	40	82.22%
	7. Bidan	310	310	0	100.00%
	8. Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	18	18	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan masyarakat	31	31	0	100.00%
	10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	0	0	0	0%

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN	SERAPAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	KAB. DAIRI				4,266,811,072	3,611,819,284	84.65%
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				4,266,811,072	3,611,819,284	84.65%
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K20220131032750				4,266,811,072	3,611,819,284	84.65%
	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	92,537,900	58,553,384		63.28%
	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	1,991,877,472	1,411,861,200		70.88%
	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	31,600,000	19,147,000		60.59%
	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	550,443,500	547,038,500		99.38%
	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	337,852,350	337,727,350		99.96%
	6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	31,600,000	27,518,000		87.08%
	7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	798,522,200	792,204,200		99.21%
	8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	31,600,000	30,655,000		97.01%
	9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	217,632,650	215,386,650		98.97%
	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	119,945,000	113,254,000		94.42%

		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	31,600,000	29,548,000	93.51%
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	31,600,000	28,926,000	91.54%
		13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen	0	0	0%
		14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				4,266,811,072	3,611,819,284	84.65%
	JUMLAH PROGRAM				4,266,811,072	3,611,819,284	84.65%
KEGIATAN LAINNYA							

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM 2	Indikator Pencapaian / Output 3			Total Pencapaian 4
1	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	BELUM TUNTAS			42.85%
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari				71.61%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	59.58%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	308,764	229,947	78,817	74%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				12.03%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	60.17%
	1. Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	68,663	51,016	17,647	74.30%
	2. Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	100	80	20	80.00%
	3. Jaringan perpipaan	68,663	53,441	15,222	77.83%
	4. Jaringan bukan perpipaan	19,043	1,628	17,415	8.55%
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik				14.08%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	2.29%
	• Jumlah yang Harus Dilayani:	308,764	8,845	299,919	3%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				11.79%

		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
	1 . Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	308,764	2,008	306,756	0.65%
	2 . Kualitas pelayanan air limbah domestik	100	100	0	100.00%
	3 . Sub-Sistem pengolahan setempat	66,655	2,008	64,647	3.01%
	4 . Sub-sistem pengangkutan	2	1	1	50.00%
	5 . Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	1	1	0	100.00%
	6 . Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	1	1	0	100.00%

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN	SERAPAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	KAB. DAIRI				10,822,418,200	10,505,349,657	97.07%
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				6,451,845,000	6,440,843,907	99.83%
	1				6,451,845,000	6,440,843,907	99.83%
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0	0	0%
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/ Detik	0	0	0%

		4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/ Detik	0	0	0%
		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/ Detik	0	0	0%
		7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	0%
		8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		<u>6,451,845,000</u>	<u>6,440,843,907</u>	99,83%
		9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum		0	0	0%
		10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0%
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
		12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
		13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM		0	0	0%
		15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
		17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0%

		18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0%
		19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0%
		20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
		21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR					6,451,845,000	6,440,843,907
	JUMLAH PROGRAM					6,451,845,000	6,440,843,907
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					4,370,573,200	4,064,505,750
2						4,370,573,200	4,064,505,750
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%

		5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
		6	Pembangunan/penyediaan sub system pengolahan setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
		7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
		8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		0	0	0%
		9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%
		10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		0	0	0%
		11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman		0	0	0%
		12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang	4,370,573,200	4,064,505,750	93.00%
		13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	1	1	100.00%
		14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen	0	0	0%
		15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0	0	0%
		16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0	0	0%
		17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan /perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0%

	JUMLAH INDIKATOR	4,370,573,200	4,064,505,750	93.00%
	JUMLAH PROGRAM	4,370,573,200	4,064,505,750	93.00%
KEGIATAN LAINNYA				
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA			
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA				

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output	Total Pencapaian
1	2	3	4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA	100.00%
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		100.00%
		Ya Terjadi Bencana	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	1	1
			Yang Belum Terlayani
			0
			80.00%
			100%

	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
	1. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	1	1	0	100.00% 100.00%
	2. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	1	1	0	100.00% 100.00%
	3. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	1	1	0	100.00% 100.00%
	4. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	1	1	0	100.00% 100.00%
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	1	1	0	100% 100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	1	1	0	100.00%
	2. Subsidi uang sewa	1	1	0	100.00%
	3. Penyediaan rumah layak huni	1	1	0	100.00%

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN	SERAPAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	KAB. DAIRI				0	0	0.00%
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				0	0	0.00%
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				0	0	0.00%
	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0%
	2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0	0%
	3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0	0%
	4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0	0%
	5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0%
	6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				0	0	0.00%

		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
		2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
		4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
		5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	JUMLAH PROGRAM				0	0	0.00%
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

E. URUSAN TRANTIBUM LINMAS

1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		TUNTAS UTAMA			94.87%
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	10	10	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	74.34%
	0 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0	0%
	0 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0	0%
	1 . Standar operasional prosedur Satpol PP	29	29	0	100.00%
	2 . Standar sarana prasarana Satpol PP	228	222	6	97.37%
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	11	11	0	100.00%
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	1	0	1	0%

KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN	TUNTAS UTAMA				96.67%
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	500	500	0		100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia		100.00%
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	0		100.00%
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1	1	0		100.00%
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	1	1	0		100.00%
	4. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	1	1	0		100.00%
	5. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	1	1	0		100.00%
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					90.00%

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	300	300	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				10.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	50.00%
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana	1	1	0	100.00%
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	50	0	50	0%
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	141	141	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	0 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	0	0	0	0%
	1 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	1	1	0	100.00%
	2 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	141	141	0	100.00%
	3 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	0	0	0	0%

	4 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	62	62	0	100.00%
--	--	----	----	---	---------

KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR	TUNTAS UTAMA			
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	36	36	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				12.78%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	63.89%
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	36	20	16	55.56%
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	1	1	0	100.00%
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	1	1	0	100.00%
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	82	0	82	0%

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN	SERAPAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	KAB. DAIRI				15,437,079,576	7,548,898,106	56.08%
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				1,401,103,800	1,278,187,900	91.30%
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			905,993,300	831,964,400	91.83%
	1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	504,452,500	435,069,600		86.25%
	2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	0	0		0%
	3	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0		0%
	4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	0	0		0%
	5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	199,999,950	195,791,950		97.90%

		6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	52,242,850	51,992,850	99.52%
		7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	149,298,000	148,110,000	99.87%
		8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	0	0	0%
		9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	0	0	0%
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				495,110,500	447,223,500	90.33%
		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	119,999,700	108,971,200	90.81%
		2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
		3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	375,110,800	338,252,300	90.17%
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				0	0	0.00%
		1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	0	0	0%
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				1,815,345,000	1,366,778,824	75,29%
4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				135,345,000	133,435,000	98.59%
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%

		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	135,345,000	133,435,000	98.59%
5		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			905,000,000	729,351,074	80.59%
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	225,000,000	224,125,000	99.61%
		5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen	0	0	0%
		6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	0	0	0%
		7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota		555,000,000	486,514,074	87,66%
		8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0	0%
		10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	125,000,000	116,725,000	93.38%
		11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%

		12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam		0	0	0%
6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			675,000,000	405,959,750	60.14%	
	1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0	0%
	2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	625,000,000	355,959,750	56,95%	
	3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	0%
	4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	50,000,000	50,000,000	100.00%	
	5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0	0%
	6	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0	0%
7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			100,000,000	0	0.00%	
	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0%
	2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0%
	3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	100,000,000	0	0	0%
	4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0	0%
	5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0	0	0	0%
	6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0%

3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				844,862,790	837,561,966	99.14%
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			844,862,790	837,561,966	99.14%
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	726,258,290	719,271,966	99.04%
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	0	0	0%
		4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%
		6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	118,604,500	118,290,000	99.73%
		7	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	0	0	0%
		8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0%
		9	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan	Orang	0	0	0%

			penyelamatan non kebakaran				
		10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0%
9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				0	0	0.00%
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	0	0	0%
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	0	0	0%
10	Investigasi Kejadian Kebakaran				0	0	0.00%
		1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	0	0	0%
11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				0	0	0.00%
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	0	0	0%
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran		0	0	0%
		3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	0	0	0%
12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				0	0	0.00%
		1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	0%

		2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%
		3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0%
		4	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0%

KEGIATAN LAINNYA

4	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25,000,000	12,427,000		49.71%
	2	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		5,675,383,993	2,075,487,708		36.57%
	3	#		0	0		0%
	4	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		5,675,383,993	5,714,329,791		96,36%

F. URUSAN SOSIAL

1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM 2	Indikator Pencapaian / Output 3			Total Pencapaian 4
1	2	3			4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS UTAMA			90.11%
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti				84.55%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	65.88%
	• Jumlah yang Harus Dilayani:	1,700	1,400	300	82%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18.67%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	93.33%
	1. Layanan data dan pengaduan	1	1	0	100.00%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	0	0	0	0%
	3. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100.00%
	4. Penyediaan permakanan	12	12	0	100.00%
	5. Penyediaan sandang	12	12	0	100.00%
	6. Penyediaan alat bantu	80	80	0	100.00%
	7. Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	0	100.00%
	8. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	30	30	0	100.00%

	9. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	1	1	0	100.00%
	10. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	20	20	0	100.00%
	11. Akses ke layanan pendidikan	1	1	0	100.00%
	12. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	4	4	0	100.00%
	13. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	0	100.00%
	14. Layanan rujukan	4	4	0	100.00%
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100.00%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti				98.67%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani:	131	131	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18.67%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	93.33%
	1. Layanan data dan pengaduan	1	1	0	100.00%
	2. Penyediaan permakanan	1	1	0	100.00%
	3. Penyediaan sandang	1	1	0	100.00%
	4. Penyediaan alat bantu	2	2	0	100.00%

	5. Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	0	100.00%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	21	21	0	100.00%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	1	1	0	100.00%
	8. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	4	4	0	100.00%
	9. Akses ke layanan pendidikan	100	100	0	100.00%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2	2	0	100.00%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	0	100.00%
	12. Layanan rujukan	2	2	0	100.00%
	13. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	0	0	0	0%
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100.00%
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100.00%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				70.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	53.33%
	• Jumlah yang Harus Dilayani:	6,000	4,000	2,000	67%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.67%

		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	83.33%
1.	Layanan data dan pengaduan	1	1	0	100.00%
2.	Penyediaan permakanan	0	0	0	0%
3.	Penyediaan sandang	600	450	150	75.00%
4.	Penyediaan alat bantu	600	450	150	75.00%
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan	30	30	0	100.00%
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1	1	0	100.00%
7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	100	100	0	100.00%
8.	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	50	50	0	100.00%
9.	Akses ke layanan pendidikan	5	5	0	100.00%
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0	0%
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	2	0	100.00%
12.	Layanan rujukan	1	1	0	100.00%
13.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	50	50	0	100.00%
14.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100.00%
15.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100.00%

4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				97.33%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani:	12	12	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				17.33%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	86.67%
	1. Layanan data dan pengaduan	1	1	0	100.00%
	2. Penyediaan permakanan	0	0	0	0%
	3. Penyediaan sandang	3	3	0	100.00%
	4. Penyediaan alat bantu	3	3	0	100.00%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	0	100.00%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1	1	0	100.00%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	3	3	0	100.00%
	8. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	0%
	9. Akses ke layanan pendidikan	3	3	0	100.00%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	0	100.00%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	0	100.00%
	12. Layanan rujukan	3	3	0	100.00%
	13. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	0	100.00%
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan	1	1	0	100.00%

	rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru				
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100.00%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100.00%
				Ya Terjadi Bencana	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani:	1,056	1,056	0	100%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00%
	1. Penyediaan permakanan	1,056	1,056	0	100.00%
	2. Penyediaan sandang	147	147	0	100.00%
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1	1	0	100.00%
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	10	10	0	100.00%
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	5	5	0	100.00%

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KAB. DAIRI				0	0	0.00%
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				0	0	0.00%
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K20220131040736				0	0	0.00%
	1	Penyediaan permakanan	Orang	0	0	0	0%
	2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0	0%
	3	Penyediaan alat bantu	Orang	0	0	0	0%
	4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0	0%
	5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	0	0	0	0%
	6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	0	0	0	0%
	7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0	0%
	8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0	0%
	9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0	0%

		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	0	0	0%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0%
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	0	0	0%
		JUMLAH INDIKATOR				0	0 0.00%
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K20220131040943				0	0 0.00%
		1	Penyediaan makanan	Orang	0	0	0%
		2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0%
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0%
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0%
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	0%
		JUMLAH INDIKATOR				0	0 0.00%
		JUMLAH PROGRAM				0	0 0.00%
	TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA						

III. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI.

1. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Untuk tahun 2022 pemerintah pusat melaksanakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021 namun hasilnya belum diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk Tahun 2023 masih dalam tahap proses penyusunan LPPD berdasarkan data penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2022.

2. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Sesuai dengan Surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 186.b /S/XVIII.MDN/04/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Dairi memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), sehingga sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Dairi telah mendapatkan 8 (delapan) kali Opini WTP dari BPK-RI secara berturut-turut yaitu sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022.

Khusus untuk opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022 belum

terbit, karena sampai dengan saat ini masih dalam tahap pemeriksaan oleh tim BPK Provinsi Sumatera Utara.

IV. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Kewenangan Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang diikuti dengan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022 dilakukan yang didahului dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 sebagaimana yang kemudian dituangkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022.

Dari sisi pendapatan, APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022 masih didominasi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Pendapatan Hibah, Dana Alokasi Desa dan Dana Insentif Daerah) dan juga Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Pendapatan Asli Daerah akan terus diupayakan dengan mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi sedangkan untuk pemungutan retribusi diupayakan dengan meningkatkan pelayanan serta memperbaiki sarana dan prasarana yang ada.

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka kebijakan anggaran belanja daerah dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan wajib, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang melalui penyelenggaraan urusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak dan juga untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah yang ada di daerah.

a. Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan;

Target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. **1.149.460.652.000,00** dapat direalisasikan sebesar Rp. Rp. **1.156.956.282.477,79** atau sebesar 100,65 % dari target. Realisasi Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Berkurang	
				Rp	%
1	PENDAPATAN	1.149.460.652.000,00	1.156.956.282.477,79	7.495.630.477,79	100,65
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70.431.000.000,00	84.618.675.420,79	14.187.675.420,79	120,14
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	19.605.000.000,00	18.270.184.613,49	(1.334.815.386,51)	93,19
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.926.000.000,00	3.406.823.472,00	(1.519.176.528,00)	69,16
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.675.000.000,00	11.662.343.516,00	1.987.343.516,00	120,54
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	36.225.000.000,00	51.279.323.819,30	15.054.323.819,30	141,55
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.062.417.682.000,00	1.058.551.026.987,00	(3.866.655.013,00)	99,64
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum	575.452.620.000,00	590.642.776.017,00	15.190.156.017,00	102,64
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	12.248.772.000,00	16.995.805.647,00	4.747.033.647,00	138,76
1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.821.759.000,00	16.982.170.786,00	11.160.411.786,00	291,70
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	557.382.089.000,00	556.664.799.584,00	(717.289.416,00)	99,87
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Khusus	334.006.196.000,00	298.902.966.384,00	(35.103.229.616,00)	89,49
1.2.2.1	Dana Alokasi	101.865.197.000,00	88.601.397.357,00	(13.263.799.643,00)	

	Khusus Fisik Reguler				86,98
1.2.2.2	Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan	70.457.223.000,00	64.528.074.245,00	(5.929.148.755,00)	91,58
1.2.2.3	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	161.683.776.000,00	145.773.494.782,00	(15.910.281.218,00)	90,16
1.2.3	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	127.395.282.000,00	127.395.282.000,00		100,00
1.2.3.1	Dana Insentif Daerah	3.320.485.000,00	3.320.485.000,00		100,00
1.2.3.2	Dana Desa	124.074.797.000,00	124.074.797.000,00		100,00
1.2.4	Transfer Pemerintah Provinsi	25.563.584.000,00	41.610.002.586,00	16.046.418.586,00	162,77
1.2.4.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	23.563.584.000,00	39.777.039.786,00	16.213.455.786,00	168,81
1.2.4.2	Bantuan Keuangan Khusus	2.000.000.000,00	1.832.962.800,00	(167.037.200,00)	91,65
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.611.970.000,00	13.786.580.070,00	(2.825.389.930,00)	82,99
1.3.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	3.611.970.000,00	3.611.970.000,00		100,00
1.3.2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	13.000.000.000,00	10.174.610.070,00	(2.825.389.930,00)	78,27

Sumber data : BKAD Kabupaten Dairi (Data 2022 Unaudit)

b. Realisasi belanja menurut jenis belanja;

Target belanja daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. **1.220.701.654.592,00** dapat direalisasikan sebesar Rp. **1.123.338.555.302,52** atau sebesar 92,02 % dari target. Target dan

realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dapat diterangkan pada tabel berikut :

**Tabel
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Berkurang	
				Rp	%
1	BELANJA	1.220.701.654.592,00	1.123.338.555.302,52	(97.363.099.289,48)	92,02
1.1	BELANJA OPERASI	827.276.195.230,00	757.712.293.113,52	(69.563.902.116,48)	91,59
1.1.1	Belanja Pegawai	473.139.350.250,00	446.610.927.852,00	(26.528.422.398,00)	94,39
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	346.210.270.868,00	303.564.192.761,52	(42.646.078.106,48)	87,68
1.1.3	Belanja Hibah	5.878.370.000,00	5.581.772.500,00	(296.597.500,00)	94,95
1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	2.048.204.112,00	1.955.400.000,00	(92.804.112,00)	95,47
1.2	BELANJA MODAL	199.390.662.362,00	172.288.707.597,00	(27.101.954.765,00)	86,41
1.2.1	Belanja Modal Tanah	500.334.786,00	497.594.040,00	(2.740.746,00)	99,45
1.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.951.351.020,00	30.873.642.482,00	(8.077.708.538,00)	79,26
1.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.014.045.834,00	45.112.604.651,00	(5.901.441.183,00)	88,43
1.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	103.468.430.891,00	90.870.427.569,00	(12.598.003.322,00)	87,82
1.2.5	Belanja Modal Aset Tetap	5.456.499.831,00	4.934.438.855,00	(522.060.976,00)	

	Lainnya				90,43
1.3	BELANJA TAK TERDUGA	10.760.000.000,00	10.062.757.592,00	(697.242.408,00)	93,52
1.3.1	Belanja Tak Terduga	10.760.000.000,00	10.062.757.592,00	(697.242.408,00)	93,52
1.4	BELANJA TRANSFER	183.274.797.000,00	183.274.797.000,00	-	100,00
1.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	-	100,00
1.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	181.574.797.000,00	181.574.797.000,00	-	100,00
1.4.2.1	<i>- Transfer Bantuan Keuangan Umum kepada Desa</i>	<i>124.074.797.000,00</i>	<i>124.074.797.000,00</i>	-	100,00
1.4.2.2	<i>- Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa</i>	<i>57.500.000.000,00</i>	<i>57.500.000.000,00</i>	-	100,00

Sumber data : BKAD Kabupaten Dairi (Data 2022 Unaudit)

c. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Anggaran pembiayaan *netto* yang merupakan selisih antara pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran merupakan anggaran yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah. Target dan realisasi Pembiayaan Daerah sebagai berikut :

Tabel
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Berkurang	
				Rp	%
1	PEMBIAYAAN	71.241.002.592,00	108.455.263.325,65	37.214.260.733,65	152,24
1.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	77.516.002.592,00	114.730.263.325,65	37.214.260.733,65	148,01
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu	77.516.002.592,00	114.730.263.325,65	37.214.260.733,65	148,01
1.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.275.000.000,00	6.275.000.000,00	-	100,00
1.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	6.275.000.000,00	6.275.000.000,00	-	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	-	142.072.990.500,92	142.072.990.500,92	∞

Sumber : BKAD Kabupaten Dairi (Data 2022 Unaudit)

V. INOVASI DAERAH

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Dairi melakukan beberapa terobosan yang diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Katalog Elektronik Lokal

Pemerintah Kabupaten Dairi telah melaksanakan transaksi pengadaan barang dan jasa melalui pemanfaatan katalog elektronik lokal. Saat ini dalam transaksi belanja Pemerintah Kabupaten Dairi telah dilaksanakan melalui e-katalog khususnya 14 produk yang sudah masuk dalam aplikasi dengan 20 penyedia lokal serta 182 produk lokal.

2. Layanan SIMRS (Sistem Informasi Rumah Sakit) RSUD Sidikalang

Saat ini Masyarakat Dairi ketika akan berobat ke RSUD Sidikalang dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui program digitalisasi (*online*) dengan memanfaatkan aplikasi SIMRS. Pendaftaran pasien yang hendak berobat dapat dilakukan secara *online* melalui anjungan mandiri (*console box*), aplikasi “RSUD SIDIKALANG” yang diinstal melalui *playstore*, dan *mobile* JKN.

Saat ini implementasi SIMRS telah terintegrasi, mulai dari pendaftaran sampai pelayanan obat di farmasi, *billing system* dan juga sampai pasien selesai dilayani (pulang) di RSUD Sidikalang.

Melalui Implementasi SIMRS ini, banyak manfaat atau keuntungan yang kita peroleh antara lain mempermudah masyarakat/pasien melakukan pendaftaran pasien rawat inap dan rawat jalan melalui Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM) yang bermanfaat untuk mengurangi kepadatan dalam antrian saat pelayanan berlangsung, terintegrasi dengan semua bagian /unit, mengetahui ketersediaan kamar, memudahkan proses penganggaran

(budgeting), memudahkan penghitungan stok obat, memudahkan penyusunan laporan kinerja dan keuangan.

3. Fasilitas Hemodialisa dan Cuci Darah

Fasilitas Hemodialisa dan cuci darah ini adalah kado terindah yang dapat dipersembahkan pada Hari Jadi Kabupaten Dairi Tahun 2020 yang silam, dan kita patut bersyukur fasilitas Hemodialisa dan Cuci Darah di RSUD sangat membantu masyarakat kita dan masyarakat sekitar Kabupaten Dairi, dalam kurun waktu Tahun 2022 telah melayani sebanyak 469 orang pasien.

4. Public Safety Center (PSC) 119

Di Sektor Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Dairi tetap konsisten memberikan pertolongan pertama kasus kegawatdaruratan medis, kecelakaan lalulintas dan bencana melalui (*Public Safety Center*) PSC 119 . Dalam kurun waktu Tahun 2022 Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) PSC 119 telah melayani 141 pasien.

5. Layanan Perpustakaan.

Untuk meningkatkan layanan perpustakaan dan karsipan di Kabupaten Dairi, membudayakan membaca serta menggunakan literasi dengan bijak, selain pelayanan perpustakaan secara langsung di kantor, Pemerintah Kabupaten Dairi juga memberikan Layanan kepada masyarakat melalui website **disperpusip.dairikab.go.id**. Dalam kurun waktu satu tahun ini telah melayani sebanyak sebanyak 15.775 orang. Selain itu upaya mendorong minat baca para pelajar dan masyarakat Dairi, Pemerintah Kabupaten Dairi juga sudah membentuk 424 Perpustakaan yang tersebar di beberapa Desa, Kecamatan, Sekolah, Rumah Ibadah, Rumah Sakit, Puskesmas, Masyarakat hingga beberapa instansi di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Dairi.

6. Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam rangka menuntaskan cakupan kepemilikan dokumen adminduk Masyarakat Kabupaten Dairi, Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi melakukan inovasi dan langkah-langkah percepatan, yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah dokumen yang diterbitkan								Total Dokumen
		Kartu Keluarga	KTP-el	SKPWNI	KIA	Akta Kelahiran	Pencatatan Perkawinan	Akta Kematian	Akta Perceraian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kerjasama Tuntas Adminduk dengan desa (Sosialisasituntas adminduk)	1.721	326	28	397	3.610	807	128	-	7.017
2	Pelayanan jemput bola penerbitan dokumen admindukke desa-desa	174	164	15	271	180	37	18	-	859
3	Pelayanan jemput bola perekaman KTP-el bagi pemula ke SLTA/ Sederajat	-	2.685	-	-	-	-	-	-	2.685
4	Pelayanan jemput bola penerbitan dokumen admindukkelompok masyarakat rentan adminduk	-	55	-	-	-	-	-	-	55

5	Pelayanan jemput bola perkawinan langsung ke rumah-rumah ibadah	281	185	5	-	10	99	-	-	580
6	Pelayanan penerbitan dokumen adminduk secaradaring (perkebbas)	15.915	2.401	5.115	823	7.963	1.155	1.120	24	34.516
7	Kerjasama penerbitan KIA dan Akta kelahiran dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah	-	-	-	6.121	148	-	-	-	6.269
8	Kerjasama penerbitan dokumen adminduk dengan RSUD dan Puskesmas se- Kabupaten Dairi	508	27	5	53	576	-	4	-	1.173
9	Kerjasama pencatatan perkawinan dan penerbitan dokumen adminduk dengan Kementerian Agama (KUA se-Kabupaten Dairi)	285	79	-	-	-	120	3	-	487
10	Kerjasama penerbitan dokumen adminduk dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama	6	5	-	-	-	-	-	1	12

7. Sektor Komunikasi dan Informatika

Untuk peningkatkan layanan informasi, komunikasi publik serta layanan pengaduan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengembangkan dan menerapkan inovasi sebagai berikut :

- a. Pemkab Dairi Sepekan (PeDas)**, merupakan siaran youtube atau TV online yang berisikan informasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam sepekan;
- b. Majalah elektronik info Dairi**, merupakan majalah online yang berisikan informasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam sepekan;
- c. Layanan Dairi Siaga 112**, merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Dairi dalam mempercepat pertolongan kepada masyarakat yang mengalami kondisi gawat darurat, seperti kebakaran, kerusuhan, kecelakaan, bencana alam, penanganan masalah Kesehatan, gangguan keamanan dan ketertiban umum, dan/atau keadaan darurat lainnya.

Sejak diluncurkan dan resmi beroperasi pada tanggal 17 Agustus 2022, Layanan Dairi Siaga 112 sudah menerima laporan sebanyak 20 tiket, yang terdiri dari Keamanan dan ketertiban masyarakat 2 tiket, kecelakaan 4 tiket, kebakaran 2 tiket, bencana alam 4 tiket, tiang listrik rubuh 1 tiket, pohon tumbang 2 tiket, ibu melahirkan 1 tiket, tenggelam 2 tiket emergency butuh ambulance 2 tiket.

- d. Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Resmi Pemerintah Kabupaten Dairi (sidumasda.dairikab.go.id)**, Layanan penerimaan dan respon berupa keluhan atau aspirasi dari masyarakat Kabupaten Dairi;
- e. Sistem Layanan Gangguan TIK (silagatik.dairikab.go.id)**, Layanan online jika ada gangguan jaringan internet di 120 titik layanan Dinas Kominfo;

- f. Sistem Informasi Dasar Wisma (sidasa.dairikab.go.id),** Sistem Informasi Dasar Wisma untuk pemberdayaan kesejahteraan keluarga Pemerintah Kabupaten Dairi oleh TP. PKK Kabupaten Dairi;
- g. [Erlis.dairikab.go.id](http://erilis.dairikab.go.id),** Aplikasi media mitra untuk merilis/melaporkan sendiri berita terkait memantau jumlah rilis di Pemkab Dairi.

8. Penyaluran KUR Kluster Kopi dan Jagung

Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian jagung dan kopi di Kabupaten Dairi, dan juga memberikan akses permodalan pertanian bagi petani pada Bulan Februari Tahun 2022 telah dilaksanakan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Dairi, Bank Sumut, PT.Dairi Agro Sejahtera, CV.Dairi Agri Farm, PT.Wahana Graha Makmur dan PT.Asuransi Jaya Indoneisa tentang Pembiayaan Sektor Pertanian di Kabupaten Dairi.

Selama ini bantuan yang kita terima adalah pupuk subsidi, tapi di semua daerah pupuk subsidi ini memang cukup sulit. Untuk itu pemerintah pusat mengalihkannya pada pemberian kredit bunga perbankan dengan bunga rendah 3 persen pertahun. PPL dan teknologi secara perlahan diimplementasikan. Itulah agri unggul melalui pertanian terpadu dan terintegrasi.

Sampai dengan saat ini untuk KUR Kluster kopi sudah tersalur kepada 26 orang petani pada 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Pegagan Hilir dan Kecamatan Sumbul dengan total luas lahan 18,5 Ha dan total nilai KUR sebanyak Rp.504.000.000,-. Sedangkan untuk KUR Kluster Jagung sudah tersalur kepada 54 orang petani dengan total luas lahan 50 Ha dan total nilai KUR sebanyak Rp.750.000.000,-.

9. Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu

Pemerintah Kabupaten Dairi sedang melaksanakan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Komoditas Hortikultura Kabupaten Dairi.

Adapun Tujuan dari pengembangan Kawasan Pertanian terpadu ini adalah

- ❖ Meningkatkan nilai tambah serta daya saing wilayah dan komoditas pertanian untuk keberlanjutan ketahanan pangan nasional;
- ❖ Memperkuat sistem Usaha Tani secara utuh dalam satu manajemen kawasan;
- ❖ Memperkuat kelembagaan petani dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran.

Adapun langkah-langkah yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Kabupaten Dairi telah menetapkan Areal Penggunaan Lain di Desa Parbuluan V Kecamatan Parbuluan seluas 500 Ha menjadi Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Kabupaten Dairi dengan Komoditi :

- ❖ Tanaman Bawang Merah 50 Ha
- ❖ Tanaman Kubis 100 Ha
- ❖ Tanaman Kentang 150 Ha
- ❖ Tanaman Cabe Merah 100 Ha
- ❖ Tanaman Kopi sebagai tanaman tumpang sari pada seluruh lokasi.

b. Menyiapkan lahan seluas 22 Ha untuk ditanami cabe yang akan dilanjutkan pada lahan lahan lain sebagai bagian dari 440ha yang sudah kita rencanakan dengan penanaman komoditi bawang merah, cabe merah kubis dan kentang di Kecamatan Parbuluan.

- c. Melaksanakan pendampingan dari PPL Pertanian, mulai dari tahap tanam hingga panen. Pendampingan dilakukan untuk memperoleh kemudahan permodalan dari bank diikuti penyuluhan saat budidaya, penyediaan infrastruktur dan jaminan pemasaran, sekaligus membawa teknologi pertanian seperti irigasi presisi untuk mendukung peningkatan produktifitas komoditi ini.
- d. Pada tanggal 21 November 2022 telah dilaksanakan pencanangan Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) hortikultura yang ada di Desa Parbuluan V, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara;
- e. Pencanangan pertanian terpadu khususnya tanaman sorgum dan jagung di Kecamatan Tigalingga oleh Wakil Menteri Pertanian RI pada tanggal 9 Desember 2022.

10. PPDB ONLINE

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Pertama dilakukan secara online untuk sekolah Negeri sesuai Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022 tanggal 25 Januari 2022 Tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Bab II Bagian Empat, Paragraf 3 Pasal 23 poin 1 Pendaftaran PPDB sebgaimana dimaksud dalam pasal 26 hurub b dilaksanakan menggunakan mekanisme daring, maka Kabupaten Dairi melalui Dinas Pendidikan melaksanakan PPDB online untuk mempermudah siswa mendaftar melalui Jalur Zonasi, Afirmasi, Perpindahan Tugas/Orang Tua Wali dan Jalur Prestasi dengan siswa Sasaran LulusanSD Yang akan

mendaftar ke SMP Negeri sesuai Daya Tampung Siswa Masing Masing Sekolah.

11. Penerapan E-Presensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi

Dalam merealisasikan prinsip penyelenggaraan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan clean government (pemerintahan yang bersih) dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Dairi berupaya membangun tata kelola yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pengembangan budaya dan perilaku kinerja PNS yang lebih transparan diharapkan mampu meningkatkan kontribusi PNS dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sesuai dengan deskripsi masalah dimaksud maka perlu kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola budaya kerja dan perilaku kerja PNS. Pengendalian dan pengawasan perilaku kerja PNS yang berasaskan keadilan dan transparansi tentu akan sangat mempengaruhi kesaran PNS dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara.

12. Inovasi Pelayanan Publik Berupa Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dengan metode jemput bola di Kecamatan Sidikalang.

Dalam rangka mempercepat dan mempermudah alur pelayanan perizinan bagi pelaku usaha mikro dengan kategori risiko rendah yang ada di Kecamatan Sidikalang, DPMPTSPK telah melakukan inovasi pelayanan publik berupa pelayanan Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dengan metode jemput bola di Kecamatan Sidikalang. Jumlah IUMK yang diterbitkan sebanyak 21 izin.

13. SICANTIK CLOUD

Melalui Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan kepada Kepala DPMPTSPK Kabupaten Dairi menyatakan bahwa Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan diproses melalui sistem yang difasilitasi oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui aplikasi pendukung (Sicantik Cloud). Adapun tujuan inovasi ini adalah :

1. Mempermudah Pelayanan Administrasi Perizinan dan non-perizinan kepada masyarakat pelaku usaha,
2. Mempermudah pengarsipan Dokumen Administrasi Perizinan dan non-perizinan
3. Mempercepat proses Perizinan dan non-perizinan.

VI. PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) yang kami sampaikan ini merupakan suatu bentuk integritas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi untuk mengaktualisasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjembatani terciptanya sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah antar stakeholder terkait guna mewujudkan good governance dan secara yuridis formil didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 23 ayat 1 (satu) dijelaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat, selanjutnya dalam ayat 2 (dua) Kepala Daerah wajib mempublikasikan RLPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Meskipun telah berupaya sedaya mampu, Pemerintah Kabupaten Dairi menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan APBD Tahun Anggaran 2022 masih ditemukan berbagai hambatan dan ketidaksempurnaan. Hal ini lebih disebabkan berbagai keterbatasan dalam sumber daya baik personil, peralatan maupun pembiayaan. Demikian juga beberapa faktor eksternal yang turut mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, seperti cuaca dan kondisi alam. Kesemuanya ini akan menjadi catatan dan bahan evaluasi perumusan kebijakan untuk perbaikan kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi ke depan.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dairi terus melakukan upaya inovasi, kreasi dan terobosan untuk menyelesaian berbagai permasalahan

serta perbaikan berbagai sistem dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam memberikan masukan dan apresiasinya melalui wadah atau penyaluran aspirasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya keterlibatan secara aktif didalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai ke tingkat Kabupaten guna mewujudkan ***Dairi Unggul Yang Menyejahterakan Masyarakat Dalam Harmoni Keberagaman.***

Demikian penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi ini kami sampaikan, seraya mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan pada Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan pada masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita dalam mengembangkan tugas pengabdian kita masing-masing.

Terima kasih, Njuah-juah, Horas, Mejuah-juah.

